Globethics Repository



Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dalam Konteks Pendidikan Islam di Madrasah

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Journal volume
Authors	Nasir, Muhammad
Publisher	IAIN Palu
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-11-03 02:21:30
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/238119

PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL DALAM KONTEKS PENDIDIKAN ISLAM DI MADRASAH

Muhammad Nasir

Pascasarjana STAIN Samarinda Kalimantan Timur
Email: ozan99@yahoo.com

Abstrak. Salah satu unsur yang harus dilestarikan dan dijaga melalui kegiatan pendidikan adalah nilai, tradisi, budaya, keterampilan dan konsep yang berlaku pada masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menggulirkan perubahan kurikulum dengan menambahkan mata pelajaran muatan lokal. Melalui pembelajaran muatan lokal diharapkan peserta didik, tidak saja memiliki pengetahuan akademis berupa pengetahuan yang bersifat global sebagaimana diharapkan, tetapi juga mempunyai kepedulian terhadap nilai-nilai sosio-kultural yang melingkupi peserta didik. Secara konsep, kurikulum berbasis muatan lokal terdiri dari dua bentuk. Bentuk pertama bersifat melekat ke seluruh mata pelajaran, dan bentuk kedua berupa kegiatan tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran. Tulisan ini, berusaha mengekslor bagaimana model dan pelaksanaan kurikulum berbasis muatan lokal di Madarasah.

Abstract. One of the elements that must be preserved and maintained through education is values, traditions, culture, skills and concepts that apply to the public. In recent years, the government rolled out changes to the curriculum by adding local content subjects. Learning through local content, students were be expected to not only have academic knowledge in the form of global knowledge, but also have a concern for the values of the their surrounding socio-cultural. Conceptually, local content-based curriculum consists of two forms. The first form is attached to all subjects, and the two form a separate activity that has nothing to do with the subject. This paper, trying to explore how the model and the implementation of local content-based curriculum in Madrasah.

Kata Kunci: Kurikulum, Muatan Lokal, Madrasah

PENDAHULUAN

Banyak pemikir dan praktisi pendidikan mengungkapkan bahwa pendidikan telah turut memberi pengaruh terhadap terjadinya alienasi peserta didik dari konteks sosial-budayanya. Politik pendidikan Orde Baru yang menganut pespektif homogenisasi yang tercermin pada pendekatan sentralisasi pengelolaan pendidikan dalam berbagai aspeknya, telah berdampak pada reduksi keragaman masyarakat Indonesia. Akibatnya, ketika peserta didik menyelesaikan pendidikan formalnya, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah bahkan pendidikan tinggi, mereka merasa asing dan pada gilirannya mereka tidak mampu memberi kontribusi nyata terhadap masyarakat yang mengitarinya. Sehingga, tidaklah terlalu berlebihan, bila dalam kenyataanya, kemudian sering terdengar ungkapan yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan semakin lebar *gave* antara dirinya dengan lingkungan sosial yang mengitarinya.

Berbagai upaya untuk menjembatani pendidikan formal peserta didik dengan lingkungan sosio-kulturalnya telah diupayakan. Sejak tahun 1980-an akhir, dalam upaya peningkatan relevansi pendidikan, pemerintah telah melakukan serangkaian terobosan, di antaranya melalui penerapan kurikulum muatan lokal. Melalui penerapan kurikulum ini, maka tuntutan untuk mewujudkan diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, sesuai dengan diversifikasi jenis pendidikan dan menyesuaikan dengan kondisi setempat menjadi sangat urgen dikembangkan. Namun, dalam implementasi kurikulum muatan lokal, sampai saat ini masih dihadapkan pada beberapa persoalan. Di antara persoalan mendasar berkenaan dengan, bagaimana perumusan kurikulum ini dilaksanakan, sehingga benar-benar mampu memberi kontribusi nyata terhadap peserta didik.

Dalam tulisan singkat ini, fokus kajiannya akan dikhususkan dalam konteks Madrasah di Indonesia. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa madrasah merupakan salah bentuk pendidikan formal yang sangat dekat dengan budaya dan karakteristik masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

PENGERTIAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Dalam hal ini, beragam pandangan telah dikemukakan sejumlah pakar. Namun, dalam bagian ini hanya akan dikemukakan beberapa definisi yang telah diajukan. Tirtaraharjda dan La Sula, sebagaimana di kutip Iim Wasliman mengungkapkan bahwa kurikulum muatan lokal adalah "...suatu program pendidikan yang isi dan media dan strategi penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah" [1] Yang dimaksud dengan isi adalah materi pelajaran yang dipilih dan lingkungan dan dijadikan program untuk dipelajari oleh mund di bawah bimbingan guru guna mencapai tujuan muatan lokal. Media penyampaian ialah metode dan berbagai alat bantu pembelajaran yang digunakan dalam menyajikan isi muatan lokal. Jadi isi program dan media penyampaian muatari lokal diambil dan mcnggunakan sumber lingkungan yang dekat dengan kehidupan peserta didik.

Mulyasa[2] dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menyebutkan bahwa Kurikulum Muatan lokal adalah kegiatan kurikuler yang mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.

---

[1]Iim Wasliman, *Modul Problematika Pendidikan Dasar* (Bandung: Pps Pendidikan Dasar UPI, 2007), h. 209.

[2]E. Murlyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kemandirian guru dan Kepala Sekolah,* (Cet. ke-3; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 256.

Substansi Muatan lokal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Pendapat ini tampaknya menganggap bahwa kurikulum muatan lokal hanya bisa diakomodasi melalui kegiatan yang terpisah dengan mata pelajaran.

Muatan lokal diorientasikan untuk menjembatani kebutuhan keluarga dan masyarakat dengan tujuan pendidikan nasional. Dapat pula dikemukakan, mata pelajaran ini juga memberikan peluang kepada siswa untuk mengembangkan kemampuannya yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, mata pelajaran muatan lokal harus memuat karakteristik budaya lokal, keterampilan, nilai-nilai luhur budaya setempat dan mengangkat permasalahan sosial dan lingkungan yang pada akhirnya mampu membekali siswa dengan keterampilan dasar sebagai bekal dalam kehidupan *(life skill).*

Dengan demikian, kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada standar isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan.

TUJUAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Menurut Muhaimin, pengembangan kurikulum muatan lokal di Madrasah bertujuan mengembangkan potensi daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah serta mengembangkan potensi Madrasah sehingga

keunggulan kompetetif.[3] Dengan kurikulum ini diharapkan, siswa di madrasah tidak tercerabut dari budaya, tradisi dan karakteristik masyarakat yang mengitarinya.

Pandangan Muhaimin di atas searah dengan penganut filsafat rekonstruksi sosial [4]yang beranggapan bahwa kurikulum madrasah seharusnya memberi pengaruh terhadap reformasi masyarakat dan membantu mensyarakat untuk menjadi lebih baik. Ada tiga standar rekonstruksi social yang dikemukakan berdasarkan literature. Ketiga standar ini memiliki tujuan yang berbeda yaitu; a) adaptasi social yang beranggapan bahwa kurikulum sekolah itu seharusnya menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat; b) rekonstruksi social berarti adanya tuntutan untuk dilakukan perubahan kurikulum dengan melihat kepentingan masyarakat dan dilakukan sesegera mungkin dan c) perspektif masa depan yaitu pandangan yang speculative yang menganggap sekolah itu seperti bengkel untuk menemukan kebutuhan masyarakat. Intinya adalah kurikulum sekolah dianggap sebagai wahana untuk perencanaan masa depan. Pendukung konsep ini menganggap bahwa isi atau materi kurikulum adalah hasil seleksi kebutuhan masyarakat, issu-issu social, ide-ide mutakhir dan aspirasi masa depan, isu-isu lingkungan, issu lingkungan, perdamaian dunia dan lain-lain.

Dapat pula dikemukakan, melalui penerapan kurikulum muatan lokal dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku siswa, berupa wawasan tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Dengan bekal tersebut diharapkan siswa mampu

---

[3]Muhaimin, *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah dan Madrasah,* Edisi I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 94

[4]Uyoh Sadulloh, *Pengantar Filsafat Pendidikan,* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 168, Bandingkan dengan Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan, Manusia, Filsafat dan Pendidikan,* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 118. Lihat pula M. Djumransyah, *Filsafat Pendidikan,* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), h. 188.

mengembangkan serta melestarikan sumber daya alam dan kebudayaan yang ada di sekelilingnya. Tujuan lain dari pemberian pengajaran muatan lokal adalah agar pengembangan sumber daya manusia yang terdapat di daerah setempat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Substansi kurikulum muatan lokal dapat ditentukan oleh satuan pendidikan yang tidak hanya terbatas pada mata pelajaran keterampilan, tetapi pembentukan sikap yang mencerminkan pengejewantahan nilai-nilai sosio-kulturla merupakan bagian penting yang harus diberikan tempat dalam penerapan kurikulum muatan lokal pada pendidikan formal.

Secara lebih khusus, kurikulum muatan lokal bertujuan: a) mengenalkan dan mengakrabkan peserta didik dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya; b) membekali peserta didik dengan kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya; c) memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional serta; d) menyadari lingkungan dan masalah-masalah yang ada di masyarakat serta dapat membantu mencari pemecahannya.[5]

LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pelaksanan kurikulum muatan lokal dalam konteks pendidikan Indonesia, relatif baru. Landasan yuridis pelaksanan kurikulum muatan lokal mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaam Nomor 0412/U/1987. Sebagai penjabarannya tertuang dalam Keputusan Direktur Jendral

[5]Wasliman, *Modul Problematika...,* h. 211; lihat pula Khaeruddin dkk, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Konsep dan Implementasinya di Madrasah,* (Yogyakarta: Pilar Media. 2007), h. 7; Lihat Pula Muhaimin, dkk, *Pengembangan Model...,* h. 94

Pendidikan Dasar Menenegah Nomor 173/-C/ Kep/M/1987.[6] Dalam perkembangannya kemudian, keberadaan muatan lokal bertambah kuat dengan dijadikannya muatan lokal sebagai salah satu isi dan struktur kurikulum yang harus diberikan pada tingkat dasar dan menengah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 UU No. 20 Thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Sekolah Dasar dan Menengah terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan, bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; Ilmu Pengetahuan Sosial; Seni dan Budaya; Pendidikan Jasmani dan Olahraga; Keterampilan/Kejuruan; dan muatan lokal (UU Sisdiknas No. 200 Th. 2003 Pasal 37 ayat 1).

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi menyatakan bahwa kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) selain memuat beberapa mata pelajaran, juga terdapat mata pelajaran muatan lokal yang wajib diberikan pada semua tingkat satuan pendidikan. Kebijakan yang berkaitan dengan dimasukkannya mata pelajaran muatan lokal dalam standar isi dilandasi kenyataan bahwa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki keanekaragaman multikultur (adat istiadat, tata cara, bahasa, kesenian, kerajinan, keterampilan daerah) merupakan ciri khas yang memperkaya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia.

Landasan lain dari pengembangan kurikulum Muatan Lokal di Madarasah adanya kebijakan desentralisasi atau otonimi pendidikan[7] yang diberlakukan di Indoensia. Secara teori, Nana Syaodih menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *decentralized curriculum managemen* adalah kurikulum yang disusun dan dikelola oleh daerah, kurikulum daerah, lokal,

[6]S. Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2004), h. 101

[7]Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi.* (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2004), h. 123

sekolah /madrasah yang berlaku di daerah atau sekolah tertentu, tujuan, isi, pembelajaran, evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik dan perkembangan setempat dan kelender pengajaran berbeda, ujian bersifat daerah atau lokal.[8]

Model kurikulum ini dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah pengembangan kurikulum berbasis madrasah. Pengembangan kurikulum berbasis madrasah dapat didefinisikan sebagai upaya pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan *botton up or school based curriculum* yang memberi peluang secara utuh kepada madrasah untuk melakukan pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal.

Pendapat lain mengemukakan pengertian pengembangan kurikulum berbasis Madrasah sebagai suatu proses yang dilakukan oleh beberapa atau keseluruhan anggota masyarakat madrasah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian terhadap satu atau beberapa aspek kurikulum yang dilakukan secara selektif, adaptif dan kreatif.

Tabel 1
Variasi Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah/Sekolah[9]

Possible Varieties of SBCD

Approach to SBCD					
	Creation				
	Adaptation				
	Selection				
		Induvidual	Induvidual In parameters	Group	Whole Staff

Keterlibatan orang dalam Kurikulum Muatan Lokal

[8]Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 78

[9]Laurie Broudy, *Curriculum Develoment in Australia,* (Australia: Prentice-Hall of Australia Pty Ltd), h. 8.

Berdasarkan bagan di atas, maka dipahami bahwa pengembangan kurikulum berbasis madrasah melibatkan beberapa hal yaitu:

- Dalam proses pengembangan kurikulum, para guru dilibatkan dalam bentuk partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum madrasah.
- Melibatkan seluruh komponen sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, staff, masyarakat, siswa dan lain-lain.
- Pengembangan kurikulum bersifat selektif, adaftif dan kreatif.
- Adanya pergeseran tanggungjawab pengambilan keputusan kurikulum dengan tidak memutuskan garis hubungan sekolah dengan pusat.
- Bersifat terus menerus dan dinamis yang secara ideal melibatkan guru,tenaga kependidikan lainnya, masyarakat, orang tua dan siswa.
- Melibatkan kebutuhan dukungan struktur yang bervariasi
- Adanya sebuah perubahan peran guru yang bersifat tradisional yang hanya bertugas sebagai pengajar menjadi peneliti dan pengembang kurikulum.10

MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS MUATAN LOKAL DI MADRASAH

Kebijakan desentralisasi pendidikan, yang di dalamnya memberi kesempatan yang luas dalam inovasi kurikulum muatan lokal, tentu masih membutuhkan kerja keras dan waktu sebelum pada akhirnya memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan performansi pendidikan di Madrasah.

[10]Laurie Brady, *Ibid.,* h. 11-13.

Sebagaimana diungkapkan pada bagian sebelumnya, kurikulum muatan lokal tidak dapat dipisahkan dari upaya menjembatani peserta didik dengan tatanan sosial yang melingkupinya. Sehubungan dengan hal tersebut, muatan lokal yang diterapkan dalam pendidikan di Madrasah juga senantiasa berjalan untuk mewariskan dan mentransformasikan nilai-nilai budaya islami yang telah melekat dalam kesadaran terdalam masyarakat lokal. Hal ini sejalan, dengan pandangan yang dikemukakan Sudjana, sebagaimana di kutip Nasarudin Anshory dan Pembayun, yang mengemukakan syarat muatan lokal, yakni:; a) kekhasan lingkungan alam, lingkungan sosial budaya daerahnya; b) menunjang kepentingan pembangunan daerahnya dan pembangunan nasional pada umumnya; c) sesuai dengan kemampuan, minat, sikap, dan perhatian siswa; d) didukung oleh Pemerintah Kabupaten setempat dan atau oleh masyarakat, baik dan segi program, dana, sarana, maupun fasilitas; e) tersedia tenaga pengelola pelaksanaan serta sumber-sumber lain sehingga dapat dilaksanakan di sekolah; f) dapat dilaksanakan, dibina, dikembangkan secara berkelanjutan, baik oleh pengelola tingkat nasional maupun tingkat daerah; g) sesuai dan selaras dengan kemajuan dan inovasi pendidikan, kebutuhan masyarakat, minat dan kebutuhan siswa, serta masyarakat pada umumnya.

Dalam mengembangkan kurikulum berbasis muatan lokal , menurut hemat penulis dapat dilakukan dengan dua model pengembangan. Kedua Model yang dimaksud adalah pengembangan kurikulum muatan lokal yang melekat ke seluruh mata pelajaran dan pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal yang berbentuk kegiatan atau program yang terpisah dari mata pelajaran pada umumnya.

Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal di Madrasah dengan Cara Internalisasi ke Seluruh Mata Pelajaran.

Sebagaimana diketahui bahwa kurikulum Madrasah di Indonesia menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

(KTSP). Salah satu isi struktur kurikulum adalah mata pelajaran. Mata pelajaran yang dimaksud adalah a) kelompok mata pelajaran agama yang meliputi Alquran Hadis, akidah akhlak, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam dan bahasa Arab; b) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang terdiri dari PPKN dan bahasa Indonesia ; c) kelompok mata pelajaran Ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi mata pelajaran matematika, IPS dan IPA; d) kelompok mata pelajaran estetika berupa pendidikan seni dan keterampilan dan e) kelompok mata pelajaran jasmani olaraga dan kesehatan.[11]

Pengembangan muatan lokal pada mata pelajaran rumpun agama Islam dapat dilakukan dengan cara mengembangkan indikator-indikator yang diawali dengan budaya, tradisi dan nilai lokal, nasal dan diakhiri budaya global. Kelompok mata pelajaran agama Islam yang meliputi Alquran Hadis, akidah akhlak, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam dan bahasa Arab dapat dikembangkan dengan cara berikut ini :

Tabel 2
Model Pengembangan Indikator Kurikulum Muatan lokal

No	Nama Rumpun Mata Pelajaran Agama Islam	Indikator
1	Sejarah Kebudayaan Islam	a. Siswa memahami kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang pada masa awal daerah tertentu. b. Siswa memahami tokoh penyebar awal mula masuknya Islam di daerah tertentu c. Siswa memahami kapan masuknya Islam di daerah tertentu d. Siswa memahami perkembangan Islam daerah tertentu e. Siswa memahami tokoh Islam yang berjasah menyebarkan dan mengembangkan Islam di daerah tertentu.

[11] Muhaimin, *Pengembangan Model...,* h. 228-229.

2	Alquran Hadis	a. Siswa memahami kitab-kitab Alquran dan Hadis terjemahan bahasa lokal b. Siswa mengenal kitab-kitab tafsir dan hadis karya masyarakat lokal c. Siswa menggali kitab tafsir dan hadis yang ditulis oleh ahli tafsir lokal
3	Akidah Akhlak	a. Siswa memahami karakteristik keyakinan masyarakat lokal b. Siswa memahami perilaku keagamaan masyarakat lokal c. Siswa mengenal tradisi dan budaya masyarakat lokal yang relevan dengan ajaran agama Islam d. Siswa memahami berbagai aliran atau organisasi keislaman yang berkembangan pada masyarakat lokal. e. Siswa menerapkan tradisi keislaman yang berkembang pada masyarakat lokal
4	Fiqh	a. Siswa memahami mazhab yang dianut oleh masyarakat lokal b. Siswa mengenal kitab-kitab fiqh karya masyarakat atau ulama lokal. c. Siswa memahami bentuk penerapan hukum islam pada masyarakat lokal d. Siswa mempraktekkan hukum adat lokal yang tidak bertentangan dengan Islam

Mengembangkan Kurikulum Muata Lokal Melalui Mata Pelajaran Muatan Lokal Tertentu atau Program Tertentu yang Terpisah dengan Mata Pelajaran

Pengembangan kurikulum muatan lokal dapat pula dilakukan melalui pemilihan dan penetapan mata pelajaran muatan lokal yang masih menjadi bagian kurikuler. Setiap madrasah dapat mengembangkan mata pelajaran muatan lokal yang diberlakukan secara menyeluruh mulai dari kelas terendah hingga kelas tertinggi. Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar

dan Indikator dapat dikembangkan oleh masing-masing madrasaha sesuai kebutuhan madrasah yang bersangkutan.

Dalam pengembangan muatan lokal perlu memperhatikan hal-hal berikut ini; a) substansi yang akan dikembangkan, materinya tidak menjadi bagian dari kelompok mata pelajaran yang telah dikemukakan; b) merupakan mata pelajaran wajib yang diselenggarakan melalui pembelajaran intra kurikuler atau masuk dalam struktur kurikulum; c) bentuk penilaiannya kuantitatif; d) madrasah harus menyusun standar kompetensi, kompetensi dasar dan silabus; e) substansinya dapat berupa program keterampilan produk dan jasa; f) setiap madrasah harus mengembangkan lebih dari satu jenis muatan lokal; dan g) peserta didik dapat mengikuti lebih dari satu muatan lokal.[12]

Menurut Muhaimin, kurikulum muatan lokal ini dapat memuat empat mata pelajaran yaitu; a) bahasa daerah. Bahasa daerah ini bertujuan untuk mempertahan nilai-nilai budaya masyarakat setempat dalam wujud komunikasi dan apresiasi sastra; b) pendidikan lingkungan hidup bertujuan untuk menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan hidup dalam bentuk kegiatan pembelajaran, pola hidup bersi dan menjaga keseimbangan ekosisten; c) bahasa Inggris bertujuan untuk mengenalkan budaya masyarakat lokal; dan d) komputer bertujuan untuk mengembangakn keterampilan penggunanan alat teknologi secara teknis. [13]

Menurut hemat penulis, dari empat mata pelajaran muatan lokal yang ditawarkan oleh muhaimin tersebut pada dasarnya hanya ada dua yang termasuk mata pelajaran muatan lokal yaitu bahasa daerah dan pendidikan lingkungan hidup. Bahasa Inggris dan Pendidikan komputer menurit hemat penulis tidak termasuk pada mata pelajaran muatan lokal dengan alasan substansi kajian

[12] Muhaimin, *Pengembangan Model...,* h. 95
[13] Muhaimin, *Ibid.* h. 234

dari kedua mata pelajaran ini lebih menekankan pada kajian yang bersifat global dan berlaku untuk semua.

Salah satu contoh pengembangan kurikulum muatan lokal yang menarik adalah pengembanng kurikulum muatan lokal di Aceh. Lembaga yang dibentuk Pemerintah daerah berupa Majelis Pendidikan Daerah atau biasa disingkat MPD, telah melakukan langkah-langkah strategis. Di antaranya dengan melakukan lokakarya penyusunan materi kurikulum muatan lokal. Dalam lokakarya penyusunan materi Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar di Aceh di peroleh masukan dan berhasil dirumuskan bahwa materi muatan lokal untuk jenjang pendidikan dasar dan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama di Aceh mencakup; a) menulis dan membaca Huruf Arab Melayu (huruf al-Qur'an); b) bahasa daerah Aceh; c) lingkungan alam Aceh dan d) akhlak dan adat istiadat Aceh.[14]

Selain pengembangan kurikulum muatan lokal melalui mata pelajaran muatan lokal yang masih menjadi bagian dari intra kurikuler, madrasa juga dapat mengembangkan kurikulum muatan lokal melalui kegiatan pengembangan diri dalam bentuk ekstrakurikuler dan bimbingan konseling. Madrasah dapat mengembangkan program ekstrakurikuler dan kegiatan bimbingan konseling yang terkait dengan budaya, tradisi dan keunggulan lokal daerah. Di antara kegiatan yang dimaksud adalah a) kegiatan ekstrakurikuler meliputi pengembangan bakat dan minat siswa seperti kgiatan keagamaan, senin tari dan musik, keterampilan dan lain-lain; b) bimbingan konseling yang meliputi bimbingan karir, bimbingan studi lanjut, bimbinan pribadi dan bimbingan sosial.

Dalam pelaksanaanya, seluruh model pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal ini harus diimbangi dengan

[14]Majelis Pendidikan Daerah, *Laporan Tiga Tahun Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Propensi Daerah Istimewa Aceh 1 September 1990 – 1 September 1993*. Banda Aceh: MPD, 1993 h. 4.

model pembelajaran yang juga menekankan pada keunggulan dan karakteristik lokal. Di antara model pembelajaran yang dimaksud adalah model pembelajaran kontekstual[15], model pembelajaran kooperatif[16], model pembelajaran inquiry[17], model pembelajaran berbasis masalah[18] dan lain-lain.

[15]Model ini menekankan pada pembelajaran yang diawali dari masalah-masalah actual dari realitas masyarakat sekitar yang kemudian dikaitkan dengan konsep dan teori yang ada. Lihat Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 253 Bandingkan dengan Ramayalis, *Metodologi Pendidikan Islam,* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 253

[16] Pembelajaran kooperatif sebagai sebuah metode pengajaran dimana para siswa bekerjasama dalam kelompok kecil untuk melakukan penelitian dengan tujuan umum. Komponen yang dimaksud adalah; a) tanggungjawab individual (*individual accountability),* b) tujuan kelompok (*group goal),* c) dukungan tugas (*task support),* dan d) sosial atau pengembangan keterampilan tugas (*social/task skill development).* Oleh karena itu, kerja kelompok yang di dalamnya terdapat berbagai komponen dianggap sebagai pembelajaran kooperatif. Sebuah tim atau kelompok pada biasanya terdiri dari 4 sampai dengan enam anggota kelompok dan pada umumnya bersifat heterogen dalam hal tingkat kemampuan, jenis kelamin, suku. Setiap anggota dalam tim memiliki tugas yang berbeda agar kerja kelompok dapat berjalan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Nattiv, Amalya. http://jte.sagepub.com/cgi/content/abstract/42/3/216, diakses 21 Mei 2013, h. 216.

[17]Model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa melalui kegiatan penelitian sistematis yang dilakukan secara berkelompok atau induvidulal. Lihat Wina Sanjaya, *Op.cit.* h. 193-196

[18] *Problem Based Learning* merupakan suatu proses pembelajaran yang diawali dari masalah-masalah yang ditemukan dalam suatu lingkungan belajar, selain itu pembelajaran berbasis masalah merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah secara aktual dan ilmiah dalam masyarakat. Sebelum siswa mempelajari suatu hal, mereka diharuskan mengidentifikasi suatu masalah, baik yang dihadapi secara nyata maupun telaah kasus untuk kemudian dilakukan investigasi untuk mencapai tujuan. Ibrahim, Muslimin & Nur, Muhammad. *Pengajaran Berdasarkan Masalah*, (Surabaya: Unesa University Press, 2000), h. 123

PROBLEMATIKA PENERAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL DI MADRASAH

Kurikulum sebagaimana dipahami tidaklah selesai dengan selesainya dokumen kurikulum semata. Tetapi yang lebih mendasar adalah bagaimana kurikulum tersebut diterapkan dalam keseluruhan aktivitas yang berlangsung di sekolah, yang pada gilirannya turut memberi kontribusi pada perubahan pada sikap, prilaku, dan keterampilan peserta didik. Sebagaimana dikemukakan pada bagian lain tulisan ini, implementasi kurikulum muatan lokal pada pendidikan dasar dapat dikatakan masih relatif baru. Sehingga berbagai persoalan dalam kurikulum ini masih menyisakan berbagai problematik.

Persoalan dalam implementasi kurikulum muatan lokal sampai saat ini cukup pelik. Hal ini berkaitan perncanaannya, pelaksanaan dan evaluasinya. Dilihat dan segi ketenagaan, pelaksanaan muatan lokal memerlukan pengorganisasian secara khusus karena melibatkan pihak-pihak lain selain sekolah. Untuk itu mungkin team teaching sebagai suatu alternatif dapat dipikirkan pengembangannya. Di samping cara-cara mengajar yang rutin oleh guru kelas, harus ada kerjasama terpadu antara pembina, pelaksana lapangan dan nara sumber.

Dilihat dan segi proses belajar mengajar, pelaksanaan muatan lokal dapat menggunakan pendekatan keterampilan proses dan pendekatan kontekstual. Melalui strtaegi pembelajaran kontekstual, peserta didik dapat menngunakan sumber belajar dari lingkungan dan berperan lebih aktif dalam mengumpulkan pengetahuan. Namun, dalam praktiknya, kompetensi guru-guru dalam menerapkannya masih merupakan persoalan besar yang harus ditangani lebih lanjut. Selain itu, sistem ujian akhir dan ijazah yang diselenggarakan di sekolah-sekolah umumnya masih menciptakan iklim pengajaran yang memberikan tekanan lebih pada mata pelajaran akademik,

sedangkan pelajaran-pelajaran yang membenikan bekal praktis kepada peserta didik dianggap bersifat fakultatif.

PENUTUP

Pendidikan sebagai upaya manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi lebih baik, dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Dalam proses ini, masuknya nilai-nilai baru menjadi tidak terelakkan. Meskipun demikian, harus tetap diingat bahwa selain misi transformatif, pendidikan juga berperan sebagai wadah konservasi nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun temurun sebagaimana terdapat dalam budaya dimana peserta didik berada. Dalam kaitan ini, pendidikan jangan sampai mencerabut peserta didiknya dari akar kultural yang dimilikinya. Dalam konteks inilah, kemudian keberadaan kurikulum muatan lokal menemukan signifikansinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi.* Jakarta : PT Grafindo Persada, 2004

Abdullah Ahmad. "Syari'at Islam di Aceh: Kajian Tentang Wewenang dan Corak Pejabat Pelaksana," *Tesis.* Banda Aceh: PPS IAIN Ar-Raniry. 2002

Abdullah, Taufiq (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial.* Rajawali: Jakarta. 1983

Al-Hamdany, Teuku Thaifurrahman. "Peranan Perencanaan Pendidikan dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, "*Tesis*,. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu administrasi Negara. 1982

Azra, Azyumardi, *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara,* cet. I, Bandung: Mizan. 2002

Badruzzaman Ismail (ed.). *Perkembangan Pendididkan di Nanggro Aceh Darussalam.* Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah. 2002.

Dakir, S. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum.* Jakarta: Rineka Cipta. 2004

Djumransyah, M., *Filsafat Pendidikan,* Malang Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2008.

Ibrahim, Muslimin & Nur, Muhammad. *Pengajaran Berdasarkan Masalah*, Surabaya: Unesa University Press, 2000

Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan, Manusia, Filsafat dan Pendidikan,* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007

Iim Wasliman, *Modul Problematika Pendidikan Dasar.* Bandung: Pps Pendidikan Dasar UPI, 2007.

Majelis Pendidikan Daerah, *Laporan Tiga Tahun Majelis pendidikan daerah (MPD) Propensi Daerah Istimewa Aceh 1 September 1990–1 September 1993.* Banda Aceh: MPD, 1993.

Laurie Broudy, *Curriculum Develoment in Australia* (Australia: Prentice-Hall of Australia Pty Ltd, t.th.

Muhaimin, *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah dan Madrasah,* Edisi I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Murlyasa, E. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kemandirian guru dan Kepala Sekolah,* Cetakan Ketiga, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Nattiv,Amalya.http://jte.sagepub.com/cgi/content/abstract/42/3/216, diakses 21 Mei 2013.

Ramayalis, *Metodologi Pendidikan Islam.* Jakarta : Kalam Mulia, 2008.

Uyoh Sadulloh, *Pengantar Filsafat Pendidikan,* Bandung: Alfabeta, 2007.Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan.* Jakarta : Kencana, 2008.